

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KANYUARA KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Ahmad Mustanir, Partisan Abadi
Dosen STISIP Muhammadiyah Rappang
E-mail: ahmadmustanir74@gmail.com

Abstract

The long term objective of this research is to observe community participation in the development planning meeting (*musrembang*). Moreover this research is also aimed at understanding socio-cultural factors such as norms, believes, knowledge, behaviors, marital status, age, sex and symbols, which influence community participation in the development planning meeting of the Village of Kanyuara, Sub-district of Watang Sidenreng, District of Sidenreng Rappang. Understanding this objective will provide academic advantages which include inputs of the development of knowledge, particularly on understanding community participation in the development planning meeting. Another advantage is for the researcher to delve into a vast knowledge on influential socio-cultural factors during the development planning meeting in the Village of Kanyara. This research found that community shows their less participation during the *musrembang*, while at the same time, the above mentioned socio-cultural factors may be categorized influential and even mostly influential towards community participation.

Keywords:

Community Partisipation, Musrenbang, Towani Tolotang

Pendahuluan

Perencanaan pembangunan adalah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan.

Pemerintah daerah punya kewenangan yang lebih dalam perencanaan, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Artinya terjadi perubahan paradigma sistem pemerintahan, baik ditingkat pusat, provinsi, dan daerah. Perubahan

tersebut menuntut paradigma baru dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang bersifat desentralisasi membuka era baru bagi pemerintahan daerah yang ada.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia mengenal dua pendekatan *top down* dan *bottom up* untuk menjamin keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi prioritas lokal, walaupun kenyataannya sebagian besar daerah belum mengakomodasi aspirasi lokal dikarenakan sebagian besar proposal program yang diajukan berdasarkan aspirasi lokal telah tersingkir dalam rapat koordinasi yang menempatkan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi tanpa memperhatikan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang dibawahnya.

Sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia yang dengan pendekatan *top down* dan *Bottom up*, nampaknya akan menjamin adanya keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun yang terjadi banyak daerah belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi lokal, karena sebagian besar proposal yang diajukan berdasarkan aspirasi lokal telah tersingkir dalam rapat koordinasi yang menempatkan proposal yang diajukan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi tanpa memperhatikan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan dibawahnya. Akibatnya, proposal akhir yang masuk ke pusat biasanya di dominasi oleh program yang diajukan oleh level pemerintahan yang lebih tinggi.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan cara pemerintah daerah menyusun rencana program pembangunan yang dianggap sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan stakeholders dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “*top down*” dengan “*bottom up*” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis. Musrenbang adalah wahana publik yang penting untuk membawa stakeholder memahami isu isu dan permasalahan daerah mencapai

kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsesus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah.

Musrenbang dilaksanakan baik pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, maupun tingkat kabupaten. Walaupun selama ini hasil dari forum tersebut di beberapa daerah tidak bisa dimplementasikan dan formalitas saja. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih cenderung menjadi retorika. Perencanaan pembangunan didominasi oleh kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD dan program SKPD. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat kelurahan dan kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasi sangat minim¹.

Sesuai observasi awal di Kelurahan Kanyuara keterlibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam musrenbang sangat rendah, ini terlihat dari hanya beberapa saja warga yang diundang dan menghadiri kegiatan tersebut. Kegiatan musrenbang yang terakhir saja hanya di hadiri oleh perwakilan kelompok Gapoktan dari elemen masyarakat.

Partisipasi dimaknai yaitu “partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan” Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dari definisi ini penulis melihat bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat yang rendah di Kelurahan Kanyuara dapat mengakibatkan perencanaan pembangunan melalui musrenbang tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang ? Serta bagaimana faktor sosial budaya mempengaruhi

¹ Marbyanto, Edy. Masalah dalam perencanaan (Refleksi singkat untuk kasus perencanaan dan penganggaran di Kaltim) (<http://edy-marbyanto.blogspot.com>) diakses 19 Maret 2016

partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang ?

Konsep Partisipasi dan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi anggota masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat². Sedangkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta pemanfaatan dan menikmati hasil pembangunan³⁴.

Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi masyarakat adalah suatu aktivitas yang mengikutsertakan perasaan dan emosional seseorang dalam proses pembuatan keputusan dan melaksanakan tanggung jawab dalam suatu organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi Program Pembangunan⁵.

Sehingga disimpulkan partisipasi masyarakat merupakan “proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan warga, mengambil peran serta, ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat tersebut dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi⁶.

² Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

³ Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta : UM Press.

⁴ Slamet, Y. 2002. *Konsep-Konsep Dasar Partisipasi Sosial*. Yogyakarta: PAU-SS UGM.

⁵ Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

⁶ Isbandi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press .

Konsep partisipasi, dalam perkembangannya, memiliki pengertian yang beragam walaupun dalam beberapa hal memiliki persamaan. Dalam konsep pembangunan, pendekatan partisipasi paling tidak memiliki tiga makna. Pertama, partisipasi dimaknai sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan dalam mempromosikan proses demokratisasi dan pemberdayaan. Kedua, pendekatan ini dikenal sebagai partisipasi dalam dikotomi instrumen dan tujuan. Konsep ketiga, partisipasi dimaknai sebagai sebuah situasi dimana pejabat lokal, tokoh masyarakat, LSM, birokrasi dan aktor-aktor lain yang terlibat langsung dengan program partisipatif, melakukan praktik yang jauh dari prinsip partisipasi.

Partisipasi sepadan dengan arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. Penggalangan partisipasi itu dilandasi adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena diantara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang peran serta semua pihak itu diperlukan (1) terciptanya suasana yang bebas atau demokratis dan (2) terbinanya kebersamaan. Selanjutnya dinyatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan⁷.

Lingkup Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Lingkup partisipasi dengan bertolak pada urutan proses perencanaan pembangunan, maka secara rinci jenis partisipasi dalam pembangunan sebagai berikut⁸ :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

Hal tidak berbeda jauh dengan apa yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo yang melihat partisipasi dalam tiga bentuk, yakni⁹ :

⁷ Slamet, Y. 2002. *Konsep-Konsep Dasar Partisipasi Sosial*. Yogyakarta: PAU-SS UGM.

⁸ Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan bersama pemerintah.
2. Partisipasi masyarakat dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan bersama pemerintah.
4. Partisipasi pada keterlibatan dalam memetik hasil dan dapat pembangunan secara berkeadilan

Pengertian Masyarakat

Masyarakat mengandung pengertian suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang sangat luas sifatnya. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas bersama¹⁰.

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain. Saling mempengaruhi artinya pengaruh dan pertalian kebathinan yang terjadi dengan sendirinya yang menjadi unsur yang harus ada bagi masyarakat. Masyarakat bukan berarti penjumlahan orang-orang saja, tetapi diantara mereka harus ada pertalian satu sama lainnya yang merupakan kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses dan menyebabkan perubahan dapat terjadi dalam kehidupan manusia¹¹.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama, menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama¹². Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan pengolahan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia¹³. Kemudian masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan berkerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka

⁹ Tjokroamidjojo. 1991. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung

¹⁰ Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta

¹¹ Hasan, Shadili. 2005. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara

¹² Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama

¹³ Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang dirumuskan. Dapat di simpulkan masyarakat itu adalah suatu system, kesatuan manusia yang memiliki suatu interaksi, kebiasaan (adat-istiadat), tata cara hidup bersama yang hidup dengan batasan-batasan (aturan-aturan) dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial yang bersifat kontinyu dan terikat¹⁴.

Pengertian Musrenbang

Musrenbang adalah forum-forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) kelurahan untuk menyepakati rencana kerja kelurahan tahun anggaran berikutnya¹⁵.

Musrenbang merupakan forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang bermakna, akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan kelurahan dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun dari luar daerah.

Musrenbang adalah Perencanaan Pembangunan Bersama Masyarakat adalah merupakan panduan atau model pembangunan kelurahan yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan¹⁶. Pendekatan ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong-royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Gotong-royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya. Secara garis besar musrenbang mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari indentifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.

¹⁴ Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

¹⁵ Tim Kerja. 2008. *Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang*

¹⁶ Sumpeno, Wahyudin. *Perencanaan Desa Terpadu (Panduan Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat)*. Jakarta : CRS Indonesia

2. Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketenteraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan kelurahan.
3. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
4. Wujud nyata peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Musrenbang berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai *consensus* bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan anggaran.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musrenbang antara lain adalah¹⁷ :

1. Faktor lingkungan fisik, mencakup; kesuburan tanah, jenis tanah, iklim, topografi dan orbitasi daerah.
2. Faktor sosial ekonomi, mencakup; jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, status pemilikan rumah / lahan, jumlah tanggungan keluarga, jumlah tenaga kerja keluarga dan tingkat kesehatan.
3. Faktor sosial budaya, mencakup; norma, nilai kepercayaan, pengetahuan, sikap, status pernikahan, usia, jenis kelamin, dan simbol-simbol.
4. Faktor policy pemerintah, mencakup; sifat-sifat koordinasi kepemimpinan lembaga sosial, pendekatan untuk memonitor masyarakat dan tingkat kebebasan untuk menyatukan pendapat dan keinginan.

Bukan sesuatu hal yang mudah untuk menerapkan kata partisipasi terutama pada suatu lingkungan masyarakat tertentu dikarenakan faktor-faktor tersebut.

¹⁷ Slamet, Y. 2002. *Konsep-Konsep Dasar Partisipasi Sosial*. Yogyakarta: PAU-SS UGM

A. Pembahasan

Tabel 1.1
Rekapitulasi Indikator Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbang

No.	Indikator	Persentase
	Kehadiran masyarakat dalam musrenbang	49.7%
	Masyarakat terlibat dalam perencanaan pada musrenbang	49.7%
	Masyarakat terlibat dalam penentuan kebijakan pada musrenbang	49.0%
	Masyarakat bertanggung jawab dalam hasil-hasil pada musrenbang	48.2%
	Masyarakat terlibat dalam pengawasan hasil-hasil kegiatan pembangunan yang diusulkan pada musrenbang	48.0%
	Masyarakat terlibat dalam penilaian hasil-hasil kegiatan pembangunan yang diusulkan pada musrenbang	48.0%
	Masyarakat dapat memanfaatkan hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah di usulkan pada musrenbang	47.7%
Rekapitulasi		48.6%

Sumber : Hasil Olahan Data, 2017

Tabel 1.2
Rekapitulasi Faktor-Faktor Norma-Norma Masyarakat Pada Partisipasi Dalam Musrenbang

No.	Indikator	Persentase
1	Perencanaan	71,9
2	Penentuan Kebijakan	72.4
3	Pertanggungjawaban	72.2
4	Pengawasan	72.7
Rekapitulasi		72.3

Sumber : Hasil Olahan Data, 2017

Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, La Mangolo di Kelurahan Kanyuara

“Jelas dengan adanya aturan dan norma-orma yang melekat dalam kehidupan masyarakat tersebut punya pengaruh penting karena setiap pembangunan tersebut disesuaikan dengan aturan yang ada di Kelurahan Kanyuara

Tabel 1.3
Rekapitulasi Faktor-Faktor Nilai Kepercayaan Masyarakat Pada Partisipasi Dalam Musrenbang

No.	Indikator	Persentase
1	Perencanaan	76.5
2	Penentuan Kebijakan	76.0
3	Pertanggungjawaban	76.8
4	Pengawasan	77.3
Rekapitulasi		76.7

Sumber : Hasil Olahan Data, 2017

Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, La Mangolo di Kelurahan Kanyuara
“Dalam musrenbang sebelumnya sudah dibicarakan alokasi dan sasaran pembangunan tersebut agar nantinya tidak bertentangan dengan nilai kepercayaan yang ada di Kelurahan Kanyuara

Tabel 1.4
Rekapitulasi Faktor-Faktor Pengetahuan Masyarakat Pada Partisipasi Dalam Musrenbang

No.	Indikator	Persentase
1	Perencanaan	88.3
2	Penentuan Kebijakan	88.0
3	Pertanggungjawaban	88.5
4	Pengawasan	88.5
Rekapitulasi		88.3

Sumber : Hasil Olahan Data, 2017

Adapun hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, La Mangolo di Kelurahan Kanyuara

“Jelas adanya pengaruh pengetahuan masyarakat yang signifikan dalam pembangunan yang ada di Kelurahan Kanyuara dan masyarakat telah menikmati adanya pembangunan tersebut”

Tabel 1.5
Rekapitulasi Faktor-Faktor Sikap Masyarakat Pada Partisipasi Dalam Musrenbang

No.	Indikator	Persentase
1	Perencanaan	79.1
2	Penentuan Kebijakan	78.8
3	Pertanggungjawaban	77.8
4	Pengawasan	77.8
Rekapitulasi		78.4

Sumber : Hasil Olahan Data, 2017

Adapun hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, La Mangolo di Kelurahan Kanyuara

“Aturan dalam musrenbang harus menerima pendapat orang lain meski kadang tidak sependapat, dalam hal ini tiap individu juga harus menghargai pendapat orang lain meski masing-masing punya program tersendiri dari perwakilan rumpun keluarga namun harus juga menghormati kebebasan dalam berpendapat”.

Tabel 1.6
Rekapitulasi Faktor-Faktor Status Sosial Masyarakat Pada Partisipasi Dalam Musrenbang

No	Indikator	Persentase
1	Perencanaan	61.2
2	Penentuan Kebijakan	61.7
3	Pertanggungjawaban	62.0
4	Pengawasan	60.2

Rekapitulasi	61.3
---------------------	-------------

Sumber : Hasil Olahan Data, 2017

Adapun hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, La Mangolo di Kelurahan Kanyuara

“Status sosial juga punya pengaruh karena kadang ada pemuka adat yang ikut dalam musrenbang dan peserta juga menaruh rasa hormat karena beliau merupakan tokoh masyarakat yang punya pengaruh dalam rumpun keluarga yang ada di Kelurahan Kanyuara

Tabel 1.7
Rekapitulasi Faktor-Faktor Simbol-Symbol Adat Masyarakat Pada Partisipasi Dalam Musrenbang

No.	Indikator	Persentase
1	Perencanaan	62.5
2	Penentuan Kebijakan	62.8
3	Pertanggungjawaban	62.0
4	Pengawasan	61.0
Rekapitulasi		62.1

Sumber : Hasil Olahan Data, 2017

Adapun hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, La Mangolo di Kelurahan Kanyuara

“Mengenai simbol-simbol adat di Kelurahan Kanyuara itu di keramatkan bahkan di jadikan suatu program pembangunan seperti contohnya sumur umum yang ada disana yang dijadikan sebagai tempat acara adat karena pada umumnya masyarakat menganggap simbol-simbol adat sebagai suatu hal yang sakral”.

Hasil penelitian dan pengamatan peneliti memperlihatkan partisipasi masyarakat berada dalam kategori kurang berpartisipasi pada kegiatan musrenbang disebabkan karena Komunitas Towani Tolotang yang mayoritas di Kelurahan Kanyuara lebih mendengarkan apa yang dikatakan Uwa dan Uwata sebagai pemegang kekuasaan

tertinggi dibandingkan apa yang di sampaikan kepala kelurahan yang bukan dari Komunitas Towani Tolotang.

Sedangkan faktor sosial budaya seperti norma-norma, nilai kepercayaan, pengetahuan, sikap, status pernikahan, usia, jenis kelamin, dan simbol-simbol yang ada dalam masyarakat berada dalam kategori berpengaruh dan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam musrenbang di Kelurahan Kanyuara karena kegiatan tersebut dalam kehidupan Komunitas Towani Tolotang juga dianggap merupakan peribadatan kepada Dewata, besar kecilnya partisipasi anggota masyarakat terhadap suatu kegiatan akan mempengaruhi kehidupan mereka kelak dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015 *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Chambers, Robert. 1992. *Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius dan Oxfam.
- Dharmawan. A. H. 2002. *Pengembangan Komunitas dan Pedesaan Berkelanjutan*. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Faperta IPB.
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, Shadili. 2005. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Isbandi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press .
- Koentjaraningrat. 1990. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Konsultan Manajemen Wilayah – VI P2KP II. 2004. *Modul Pelatihan Pemetaan Swadaya dan Perencanaan Partisipatif Bagi Fasilitator*. Palu.
- Korten, David C. 1984. *People Centered Development*. West Harford: Kumarian Press.

- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Mishra, S.N. 2001. *Participation and Development*. New Delhi: Kay-Kay Printed.
- Mubyarto. 2007. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasdian, Fredian Tonny. 2015. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Poerwadarmita W,J,S. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Roestandi, Achmad. 2007. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara.
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Slamet, Y. 2002. *Konsep-Konsep Dasar Partisipasi Sosial*. Yogyakarta: PAU-SS UGM.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Edisi Revisi. Cetakan Ke 17. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama.
- Sumpeno, Wahyudin. *Perencanaan Desa Terpadu (Panduan Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat)*. Jakarta : CRS Indonesia.
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta : UM Press.
- Tjokroamidjojo. 1991. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Dokumen-Dokumen dan Internet :

- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 050-187/kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunanann (Musrenbang)
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Tim Kerja. 2008. *Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang*.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 96 tentang Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

USAID, Musrenbang sebagai instrument Efektif dalam penganggaran,(www.lgsp.or.id) diakses 19 Maret 2016.

Marbyanto, Edy. Masalah dalam perencanaan (Refleksi singkat untuk kasus perencanaan dan penganggaran di Kaltim) ([http//edy-marbyanto.blogspot.com](http://edy-marbyanto.blogspot.com)) diakses 19 Maret 2016.